

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Asril Sitompul. *Pasar Modal : Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Wardah. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Budiman N.P.D Sinaga. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1987.
- Edward Maliq A.S. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Kepailitan (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor :98PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*, Studi Kasus Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Farida Hasyim. *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hamud M.Balfas. *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ctk. Kedua, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Inda Rahadiyan. *Hukum Pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Ctk. Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2004.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan :Perikatan pada umumnya*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1993.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. *Perikatan Pada Umumnya*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2013.

- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk. Kelima belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006.
- Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____. *Hukum tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, UMM PRESS, Malang, 2007.
- _____. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2009
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014
- Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sutan Remi Sjahdeni. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Ctk. Kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- _____. *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, , Ctk. Ketiga, Grafiti, Jakarta, 2009.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 61.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.O5/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST

http://repository.binus.ac.id/content/F0322/F032229982.ppt&ved=0ahUKEwjg6KZL9dXJAhUBMZQKHUQ6ByYQFggnMAU&usg=AFQjCNGDYSkf46FQedjRwYcl5p8a_GHIVQ&sig2=SHHxQZ-srMP2EuTUAg8mnq diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 15:53 WIB.

http://www.academia.edu/9722311/Fungsi_SRO_di_Pasar_Modal diakses pada tanggal 12 Desember 2015.

http://www.academia.edu/8896703/pengertian_piutang_dan_hutang_PIUTANG diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 15:36 WIB.

<http://www.academia.edu/11337961/Uang> diakses tanggal 1 Desember 2015 pukul 07:45 WIB.

kbbi.web.id/hak diakses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 07:54.

www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SP-Izin-Brent.aspx diakses pada tanggal 6 Januari 2015 Pukul 07:09 WIB.

www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx diakses pada tanggal 20 Januari 2016 Pukul 14:55.